

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran

Fitur yang integral dengan keberhasilan program pengembangan profesional adalah kolaborasi aktif di antara para guru. Misalnya, program pengembangan profesional yang merupakan bagian dari upaya reformasi seluruh sekolah dirancang untuk mendorong kolaborasi di antara para guru di sekolah, sehingga mereka mengoordinasikan instruksi untuk mencapai tujuan bersama (Kelcey & Phelps, 2013: 522.). Selain itu, untuk mencapai pemenuhan diri melalui pengembangan diri dalam pendidikan, membutuhkan landasan kesungguhan dan kesinambungan yang mencakup generasi guru dan pelajar, serta perubahan politik di masa depan (Higgins, 2011: 248).

Para guru akan menjadi lebih profesional jika mereka mengambil peran lebih aktif dalam mengembangkan metode kerja dan kurikulum mereka dan berkolaborasi dengan personel lain dalam sistem pendidikan sehingga efisiensi dan produktivitas sekolah akan meningkat (Ringarp, 2012: 335). Guru juga memiliki otonomi untuk aktif dan terlibat dalam dialog dengan guru dan administrator lainnya, sehingga mereka dapat mendiskusikan gagasan yang mereka miliki (Naylor, 2015).

Selaras dengan kedua pendapat tersebut, Vangrieken *et al.* (2015) mengemukakan bahwa kolaborasi guru terbayarkan pada siswa, guru, dan

seluruh tingkat sekolah, yang menegaskan pentingnya merangsang kolaborasi guru. Sebagai contoh, ketika guru berkolaborasi, kinerja pendidikan siswa meningkat, sekolah mengalami perubahan budaya, lebih inovatif dan dicirikan oleh struktur kekuatan yang rata. Sedangkan para guru tidak hanya mengalami kemajuan dalam hal kinerja, tetapi pada tingkat pribadi, guru tampaknya juga mendapat manfaat misalnya merasa kurang terisolasi, lebih termotivasi, dan memiliki moral yang lebih baik.

Proses kolaborasi guru di Indonesia adalah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan merupakan salah satu bentuk pelatihan jangka panjang. Secara umum, strategi pelatihan jangka panjang berguna untuk meningkatkan kemampuan guru secara efektif dalam memberikan konten kurikulum dan bimbingan pelajaran yang lebih baik, mulai dari perencanaan, praktik pembelajaran, dan pendekatan kurikulum lainnya (Vernez *et al.*, 2016). Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk mengetahui manajemen kelas karena manajemen kelas adalah salah satu faktor terbesar dalam pembelajaran siswa, lebih menonjol daripada proses metakognitif, proses kognitif, lingkungan rumah, dan dukungan orang tua .

Long *et al.* (2017: 15) menyebut kolaborasi guru yang disebut serikat guru dipandang sebagai batu loncatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, serika guru dianggap melindungi anggota yang memiliki konten pengetahuan yang tidak memadai dan memiliki kinerja yang buruk karena guru sebagai pelayan negara diharuskan untuk bisa menerapkan kurikulum dengan baik.

Mengingat masalah yang muncul sebelum adanya program pelatihan guru adalah bahwa Universitas hingga saat ini tidak berpartisipasi dalam pelatihan guru karena mereka dianggap tidak dapat diandalkan, terlepas dari fakta bahwa mereka dapat menawarkan pendidikan berkualitas lebih tinggi daripada yang disediakan oleh lembaga yang dikendalikan secara terpusat Scott (2018). Selain itu, menurunnya prestasi siswa di sekolah sering disalahkan pada guru yang tidak kompeten. Dengan demikian program pendidikan guru bertanggung jawab atas kegagalan mempersiapkan calon guru untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dalam sistem pendidikan saat ini (Goodman *et al.*, 2008) karena guru yang baik sangat penting untuk bisa memberikan siswa alat yang mereka butuhkan untuk berhasil.

Sementara itu, berbeda dengan pendapat tersebut, Raya & Sercu (2007) mengatakan bahwa perubahan dalam pendidikan sekarang disebut radikal, tidak superfisial, dan mereka membutuhkan perubahan dalam keyakinan, sikap, dan nilai-nilai guru. Oleh karena itu, pendidikan guru perlu didekati dari perspektif pengembangan guru, bukan pelatihan guru. Lange (1983) menggambarkan istilah “pengembangan guru” yang menggambarkan suatu proses pertumbuhan berkesinambungan, intelektual, pengalaman, dan sikap. Inisiatif seperti komunitas pengembangan profesional dan pengajaran tim atau pengajaran bersama memberikan peluang unik bagi guru untuk fokus pada masalah umum dalam pekerjaan mereka (Goddard *et al.*, 2015).

Di Indonesia, salah satu bentuk pelatihan guru dalam jangka panjang untuk meningkatkan kompetensi guru dan membantu guru menyelesaikan

permasalahan guru di lapangan adalah dengan dibentuknya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar/kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. MGMP sebagai forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMK/MAK, SMALB/MALB yang berada pada suatu wilayah, kabupaten, kota, kecamatan, sanggar dan gugus sekolah.

Tujuan diselenggarakannya MGMP menurut Pedoman MGMP terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Sedangkan beberapa tujuan khusus MGMP antara lain: Pertama, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kedua, mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan memcerdaskan siswa. Ketiga, untuk membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Menurut pedoman MGMP, MGMP berperan untuk mengakomodir aspirasi dari/oleh dan untuk anggota, mengakomodasi aspirasi masyarakat dan siswa, melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses

pembelajaran, dan sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan informasi kebijakan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip MGMP antara lain, merupakan organisasi mandiri, memiliki dinamika organisasi yang dinamis berlangsung secara alamiah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, mempunyai visi dan misi dalam upaya mengembangkan pelayanan pendidikan khususnya proses pembelajaran efektif dan efisien, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide pembelajaran yang efektif dan efisien, serta memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) sekurang-kurangnya memuat: (a) Nama dan tempat. (b) Dasar, tujuan dan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pertemuan MGMP menurut pedoman MGMP antara lain : Pertama, meningkatkan pemahaman guru tentang kurikulum yang dipakai dalam proses pembelajaran beserta perangkat yang dibutuhkan dalam mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum, sehingga setelah mengikuti kegiatan MGMP guru diharapkan dapat membuat perangkat pembelajaran dan dapat menjalankan kurikulum yang digunakan dengan benar. Karena guru harus dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, guru harus diberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai yang membantu mereka berkontribusi secara efektif dalam operasi pengembangan kurikulum (Alsubaie, 2016). Kedua, mengembangkan silabus dan sistem penilaian. Guru diharapkan mampu mengembangkan silabus yang sudah ada dan diharapkan mampu memilih metode penilaian pembelajaran disesuaikan dengan materi, kemampuan siswa, media alat bantu pembelajaran.

Ketiga, MGMP mengembangkan dan merancang bahan ajar. Guru dilatih untuk dapat mengembangkan bahan pelajaran pokok sehingga guru diharapkan mampu menyusun rancangan bahan pelajaran. Keempat, meningkatkan pemahaman tentang pendidikan berbasis luas (*Broad based education*) dan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (*life skill*). Guru dalam mengajar tidak hanya berfokus terhadap materi yang diajarkan tetapi mampu menanamkan keterampilan kepada siswa. Kelima, mengembangkan model pembelajaran efektif. Guru dalam mengajar harus fokus terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Gainous & Martens (2012) menyatakan guru dapat menentukan metode yang paling baik dan produktif digunakan untuk kewarganegaraan. Efek suatu ruang kelas terbuka, teknik pembelajaran aktif, konsumsi media, layanan belajar, dan keterlibatan masyarakat pada kapasitas demokratis semua menjadi petunjuk yang berguna untuk memilih metode yang paling produktif dari instruksi kewarganegaraan.

Keenam, MGMP mengembangkan dan melaksanakan analisis sarana pembelajaran yang tepat untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Ketujuh, mengembangkan dan melaksanakan pembuatan alat pembelajaran sederhana yang sesuai dengan materi dan kemampuan sekolah guna menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Kedelapan, mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran berbasis komputer, karena Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah alat yang ampuh untuk pemecahan masalah, pengembangan konseptual, dan pemikiran kritis yang membantu proses

pembelajaran lebih mudah. Dengan laju pengetahuan dan perubahan TIK yang sangat cepat, para guru kadang-kadang merasa agak sulit untuk mengatasi tantangan intelektual baru yang dilemparkan oleh konteks global dan lokal yang berubah. Oleh karena itu, memperbarui pengetahuan TIK adalah kebutuhan saat ini.

Para pendidik guru harus memperoleh pengetahuan baru tentang TIK sebelum mereka dapat mempersiapkan siswa mereka untuk memenuhi tuntutan dan tantangan abad ke-21 (Jaiswal, 2011). Penggunaan TIK di kelas adalah aset bagi setiap guru karena guru dapat menunjukkan pelajaran baru dan menyajikan materi baru (Mahapatra, 2018: 750). Kesembilan, mengembangkan media dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Guru mampu merencanakan dan mengembangkan media apa yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran.

Sedangkan yang menjadi program kegiatan pada MGMP terdiri dari program rutin dan program pengembangan. Program rutin sekurang-kurangnya terdiri dari diskusi permasalahan pembelajaran; penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; analisis kurikulum; penyusunan instrument evaluasi pembelajaran; dan pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional.

Adapun program-program pengembangan dalam MGMP antara lain penelitian; penulisan Karya Tulis Ilmiah, seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel; pendidikan dan pelatihan

berjenjang (diklat berjenjang); penerbitan jurnal MGMP; penyusunan website MGMP; forum MGMP provinsi; kompetisi kinerja guru; *Peer Coaching* (pelatihan sesama guru menggunakan media ICT); *Lesson Study* (kerjasama antar guru untuk memecahkan masalah pembelajaran); *Professional Learning Community* (komunitas pembelajaran profesional); TIPD (*Teachers International Professional Development*)/kerjasama MGMP internasional; *Global Gateway* (kemitraan lintas negara)

Terkait dengan kegiatan pengembangan kurikulum, dimaksudkan untuk membawa perubahan tertentu pada siswa dan penilaian sejauh mana perubahan ini terjadi. Partisipasi dalam kegiatan pengembangan kurikulum dapat mengarah pada peningkatan profesionalisme guru. Kegiatan pengembangan kurikulum dapat dilakukan dalam berbagai pengaturan, baik oleh guru individu atau oleh kelompok guru yang bekerja bersama (Nicholls & Nicholls, 2018).

Sama halnya dengan Indonesia, Meksiko juga memiliki beberapa kegiatan yang diambil untuk memperkuat praktik mengajar guru, dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan siswa mereka (Reimers *et al.*, 2014) antara lain: Pertama, Perencanaan Pelajaran (*Lesson Planing*). Dalam kegiatan ini guru dibantu untuk mengembangkan dan menerapkan rencana pelajaran berkualitas tinggi yang mencerminkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan resmi. Fokus dari kelompok perlakuan ini adalah membantu guru mengembangkan strategi pedagogis untuk melaksanakan kurikulum, unit pengajaran yang diperpanjang selama beberapa hari dengan berbagai bahan ajar dan pendekatan untuk melibatkan siswa.

Kedua, Pembelajaran Partisipatif (*Participatory Learning*). Melalui kegiatan ini guru diinstruksikan menggunakan metodologi partisipatif dimana siswa harus memilih tantangan dalam komunitas dan mengembangkan proyek aksi untuk menanganinya. Kondisi ini dirancang untuk menila dampak dari pendekatan pedagogis alternatif yang menggabungkan pembelajaran layanan, pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran pengalaman

Ketiga, *Lesson Planning and Participatory Learning (LP & PL)* adalah penggabungan dari perencanaan pembelajaran dan pembelajaran partisipatif. Guru dibantu dalam mengembangkan dan menerapkan rencana pelajaran berkualitas tinggi dan diinstruksikan menggunakan pembelajaran partisipatif. Kondisi ini terjadi dirancang untuk menilai dampak dari menggabungkan perlakuan.

2. Guru

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah (Sagala, 2009: 21). Berdasarkan bunyi pasal 39 (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Guru memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara

optimal melalui lembaga sekolah, baik yang didirikan oleh sekolah negeri ataupun swasta.

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian. Sebab orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina.

Hal ini berarti bahwa pendidik atau guru merupakan suatu profesi yang dituntut memiliki kemampuan khusus dalam bidang pendidikan dengan hasil yang berkualitas berdasar pengalaman dan ilmu tentang pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Untuk itu guru harus menguasai bahan atau materi yang akan disampaikan dan juga harus mengembangkannya secara berkelanjutan.

Menurut Tedjawati (2011: 480) berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun berbagai pihak yang peduli terhadap pembelajaran di sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain dalam bentuk penataran, kualifikasi pendidikan guru, pembaharuan kurikulum, implementasi model atau metode pembelajaran baru, dan penelitian tentang kesulitan dan kesalahan siswa dalam belajar atau yang sering dilakukan guru seperti penelitian tindakan kelas.

Profesi guru dituntut untuk menjadi profesional dalam menjalankan kewajibannya sebagai tenaga pendidik. Peran dari guru tidak hanya sekedar

memberikan materi pelajaran untuk siswanya atau menanamkan nilai afektif maupun psikomotorik, namun jauh dari itu guru juga sebagai pihak administrasi dan perencana dimana para guru juga harus mengelola terkait administrasi siswa seperti menganalisis data siswa, dan juga merencanakan pembelajaran itu sendiri berdasarkan kurikulum pembelajaran yang sudah ditetapkan, menjalin komunikasi dengan interaktif dengan masyarakat, dan melakukan bimbingan bagi anak didik yang membutuhkan.

Di samping tugas mengajar, ada juga beberapa persoalan atau tugas prinsip yang semua guru harus mengetahui dan menguasainya sebagai bagian dari tugas seorang guru yang profesional, yakni tugas administrasi kurikulum dan pengembangannya, pengelolaan peserta didik, personel, sarana dan prasarana, keuangan, layanan khusus, dan hubungan sekolah-masyarakat (Sagala, 2009: 18).

Sebagai komponen strategis dalam peningkatan kualitas pengelolaan pengajaran, hampir semua reformasi di bidang pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode mengajar baru, pada akhirnya tergantung pada guru. Untuk itu dalam proses belajar mengajar guru, dituntut memiliki kompetensi yang tinggi. Tentunya dengan kompetensi yang dimiliki seorang guru akan dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan proses belajar mengajar yang efektif. Seorang guru yang tidak memiliki kompetensi, tentu proses mengajar tidak dapat berjalan dengan efektif.

Agar guru dapat mengembangkan kompetensinya dengan baik maka guru tidak boleh terisolasi dengan masyarakat ataupun lingkungan sekolah

sendiri. Guru harus senantiasa berkembang dan cakap di berbagai keadaan dan tempat sehingga dapat menjadi tauladan bagi siswanya. Guru yang profesional akan senantiasa belajar dan mengembangkan apa yang telah dipunyai sehingga dapat diturunkan atau dicontohkan untuk siswanya kelak dan sekaligus sebagai agen perubahan untuk siswanya. Sesuai dengan pendapat Oliva & Pawlas (1984) performansi seorang guru dan sikapnya selalu dinilai oleh siswa, guru lain, administrator, maupun masyarakat umum.

Bagi siswa yang memiliki penilaian negatif terhadap sikap dan perilaku gurunya akan mempengaruhi psikologis mereka dalam menerima ilmu pengetahuan yang diajarkan seperti acuh tak acuh dan tidak memperhatikan dan bahkan mengejeknya. Padahal guru berperan sebagai orangtua kedua yang kedudukannya berada di sekolahan, yang bertugas meneruskan pengajaran yang tidak sanggup dilakukan oleh orang tua dirumah serta membina sikap siswa, oleh karena itu guru perlu menguasai perkembangan psikologis siswa.

Profesionalisme sudah menjadi tuntutan di dunia. Profesionalisme diharapkan dapat menjadi bagian dari kepribadian guru sehingga ia dapat mengembangkan diri sendiri secara otonom (Barnawati & Arifin, 2014: 9). Dengan menginternalnya sikap yang profesional di setiap diri guru, maka akan berdampak pada apa yang dilakukan guru terutama dalam melakukan pengajaran di sekolah. Guru yang profesional juga harus mampu mendisiplinkan diri dalam mengatur waktu untuk kepentingan diri, keluarga, tugas dan kemasyarakatan (Paraba, 2000: 9)

Untuk menjadi guru yang profesional, seorang guru harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui pendidikan tertentu (Baharuddin: 2014: 196). Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Augustin *et al.* (2013) bahwa untuk menyiapkan guru harus mengembangkan proses yang akurat yaitu guru harus memiliki motivasi, berpengalaman di bidang yang sesuai, dan mengenal karakter siswa.

Pada abad ke 20 pun persiapan guru profesional dilakukan melalui program sertifikasi. Sebagaimana yang dikemukakan Lucas (1999) bahwa beberapa persiapan guru pada abad ke 20 antara lain melalui sertifikasi, dari sekolah normal menuju perguruan tinggi negeri, dan persiapan guru di Universitas. Low & Tan (2017) berpendapat bahwa persiapan pendidikan guru di abad ke-21 adalah guru harus memiliki nilai, keterampilan, dan pengetahuan.

Berbeda dengan beberapa pendapat sebelumnya Chetty *et al.* (2014) memiliki pandangan yang berbeda tentang guru. Mereka mengemukakan bahwa guru yang unggul tidak hanya berkontribusi pada pembelajaran siswa, tetapi juga berdampak pada siswa mereka jauh di luar kelas saat mereka melanjutkan pendidikan dan hidup dan bekerja sebagai orang dewasa.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa persiapan calon guru menjadi sangat penting yang tentunya harus mengembangkan proses yang akurat baik persiapan internal dan eksternal seorang guru. Persiapan internal berupa nilai, keterampilan dan pengetahuan. Sementara

persiapan eksternal adalah persiapan yang dilakukan oleh lembaga terkait baik melalui program sertifikasi maupun persiapan oleh perguruan tinggi.

3. Kompetensi Guru

Pengertian dasar kompetensi yaitu kemampuan atau kecakapan. Kompetensi pada umumnya merupakan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok atau bahkan lembaga. Kemampuan atau keterampilan tersebut melekat pada diri seseorang. Suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mencapai suatu tujuan.

Guru dikatakan berkompotensi di bidangnya apabila memiliki kemampuan secara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kompetensi mencakup kemampuan atau kecakapan (Boyatzis, 2008: 6). Peningkatan kompetensi keguruan semakin dibutuhkan mengingat terjadinya perkembangan dalam pemerintahan, dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemberlakuan sistem otonomi daerah itu juga diikuti oleh perubahan sistem pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan secara desentralisasi akan semakin mendekatkan pendidikan kepada *stakeholders* pendidikan di daerah dan karena itu guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya (Saud, 2009: 99).

Tingkat kompetensi guru dapat diketahui melalui adanya uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik, dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi

sosial dan kepribadian. Gittomer *et al.* (2011: 433) mengemukakan bahwa ujian terhadap guru tidak dirancang untuk menjadi prediktor kualitas guru. Meskipun tes tidak dimaksudkan untuk menjamin keahlian atau bahkan praktik mengajar yang kompeten, akan tetapi melalui tes dapat diketahui tingkat pengetahuan minimum seorang guru.

Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Geiger *et al.* (2014), bahwa lisensi guru diberikan oleh negara untuk menunjuk individu yang dianggap memenuhi syarat sepenuhnya untuk mempraktikkan profesi mereka. Persyaratan lisensi biasanya terkait dengan standar persetujuan program persiapan pendidik dengan menetapkan standar minimum untuk lisensi guru. Ujian lisensi guru berkorelasi signifikan dengan efektivitas guru, walaupun korelasinya relatif kecil (Shuls & Trivitt, 2015a, 2015b).

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik benang merah bahwa kompetensi merupakan kemampuan keahlian pada bidang tertentu yang diperoleh berdasarkan pengalaman yang dapat diwujudkan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Dengan kata lain, agar dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaannya, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Mengacu pada beberapa pengertian kompetensi maka dalam hal ini kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. Sikap profesional dan kompetensi keahlian yang dimiliki guru tidak lain pada bidang pembelajaran. Guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran di sekolah yang menentukan keberhasilan peserta didiknya.

Faktor terpenting dalam pembelajaran adalah guru (Bhargava *et al.*, 2011: 77). Mengajar merupakan kebiasaan yang dilakukan seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Proses pembelajaran terjadi apabila interaksi antara guru dan peserta didik atau sebaliknya yang dihasilkan dengan perubahan tingkah laku berupa pengetahuan yang sifatnya baru, penguatan wawasan dan pengalaman. Sejalan dengan ungkapan Cooper (2011: 85) bahwa seorang guru dikatakan efektif dalam mengajar apabila melibatkan peserta didik selama pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 (3) menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai agen pembelajaran antara lain: Pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Kedua,

kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Ketiga, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Terakhir yang keempat, kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta.

4. Kompetensi Pedagogik

Pengetahuan konten pedagogis mengacu pada pengetahuan mendalam tentang praktik dan metode pengajaran yang mencakup pemahaman tentang apa yang membuat topik pembelajaran tertentu menjadi lebih mudah (Carney & Roselmina, 2013: 42) yaitu melalui kerangka pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan disposisi seorang guru yang perlu dilakukan secara efektif dalam situasi pengajaran yang diberikan (Grieser & Hendricks, 2018: 2). Lebih lanjut mereka menyebutkan terdapat empat komponen umum dalam pengetahuan konten pedagogik yaitu: (a) pengetahuan tentang pemahaman siswa, (b) strategi dan representasi pembelajaran, (c) kurikulum, dan (d) nilai-nilai dan kepercayaan guru tentang pendidikan.

Barrett *et al.* (2014) juga mengemukakan bahwa pendekatan, metode dan teknik pedagogis melibatkan peserta didik secara utuh sehingga mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam pengalaman, penemuan, tantangan,

analisis, perbandingan, refleksi dan kerja sama sehingga kegiatan belajar cenderung sangat efektif.

Terkait dengan beberapa komponen tersebut, Freire (2005), yang umumnya dikenal sebagai pendiri pedagogi kritis menggambarkan proses “pendidikan perbankan”. Proses ini sering dikaitkan dengan kuliah tradisional, di mana pakar berdiri di depan kelas dan menyampaikan secara monolog tentang topik tertentu, sering menyajikan informasi sebagai fakta abadi, dengan sedikit atau tanpa partisipasi dari siswa. Dalam penggambaran Freire tentang model pendidikan perbankan, guru membuat setoran pengetahuan ke dalam rekening siswa, tanpa memerlukan pemrosesan atau perubahan informasi ini di pihak mereka. Freire menganggap pendidikan sebagai alat untuk emansipasi sosial dan budaya, sesuatu yang dapat dicapai dengan menggambarkan dan mempraktikkan pendidikan sebagai proyek politik dan pedagogis di mana dialog, demokratisasi hubungan guru-siswa, konstruksi kurikulum dan membuat pembelajaran menjadi relevan dengan pelajar akan lebih bernilai (Schugurensky, 2014: 39).

Selaras dengan pendapat Schugurensky, Heggart *et al.* (2018) mengemukakan bahwa Pendidik kewarganegaraan maksimal berkomitmen untuk memajukan pendekatan pembelajaran kewarganegaraan dengan fitur pokok berikut: berpusat pada peserta didik; pengalaman; berorientasi pada masalah dan tindakan; analisis rasial, berklasifikasi, dan gender tentang kekuasaan; dan memperkuat ruang publik dan demokrasi. Jenis pendekatan

terhadap pendidikan ini memiliki banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip pedagogi kritis.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Indikator kompetensi pedagogik di muat dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru yang menyebutkan kompetensi pedagogik sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut. Pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus, keempat, perancangan pembelajaran. Kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Ketujuh, evaluasi hasil belajar, dan kedelapan, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Madhavaram & Laverie (2010) mendefinisikan kompetensi pedagogis sebagai kemampuan seorang individu untuk menggunakan koordinasi, mengkombinasi sinergis sumber daya nyata (misalnya, materi instruksi seperti buku, artikel, dan kasus dan teknologi seperti perangkat lunak dan perangkat keras) dan sumber daya tak berwujud (misalnya, pengetahuan, keterampilan, pengalaman) untuk mencapai efisiensi dan/atau efektivitas dalam pedagogik.

Lebih lanjut keduanya menjelaskan ada 5 komponen dalam kompetensi pedagogik, yaitu pengetahuan konten (atau pengetahuan tentang subjek materi), pengetahuan tentang pendekatan pedagogis, kemampuan manajemen kursus, kemampuan manajemen kelas, dan kemampuan manajemen siswa. Masing-masing komponen-komponen ini akan meningkatkan instruktur efektivitas pengajaran.

Suprihatiningrum (2016: 101) mengatakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substansi, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Pengetahuan konten pedagogis (PCK) dan pengetahuan konten (CK) adalah komponen kunci dari kompetensi guru yang memengaruhi kemajuan siswa (Kleikmann, *et al.*, 2012: 90). Untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas, para guru di pendidikan tinggi harus memiliki pengetahuan konten pedagogis (Zepke, 2013: 97).

Kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, menurut Mulyasa (2006: 75) sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran yang tertuju pada pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis dalam peraturan pemerintah tentang guru, pemanfaatan teknologi pembelajaran,

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

Membahas lebih jauh tentang keahlian pemanfaatan teknologi oleh seorang guru sebagai bagian dari kompetensi pedagogik, Koehler *et al.* (2013: 14) menjelaskan bahwa jika para guru ingin mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka maka yang dibutuhkan adalah pendekatan yang memperlakukan pengajaran sebagai interaksi antara apa yang diketahui guru dan bagaimana mereka menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam keadaan atau konteks unik di dalam ruang kelas mereka. Upaya integrasi harus dirancang atau disusun secara kreatif untuk ide materi pelajaran tertentu secara khusus konteks kelas.

Sebagai transisi ke era informasi yang telah berkembang, perkembangan teknologi tidak hanya terlihat pada peralatan teknologi tinggi yang sekarang digunakan oleh guru di ruang kelas tetapi juga dalam perubahan kompetensi yang diperlukan yang diharapkan dari guru. Penting bagi masa depan masyarakat bahwa guru yang memiliki peran mengembangkan individu yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat informasi, dididik untuk menjadi individu yang kreatif yang dapat menyesuaikan diri dengan inovasi dan yang mampu berpikir kritis (Fink, 2013; Manik *et al.*, 2014).

Koneksi antara implementasi teknologi dan keputusan pedagogis sangat penting untuk pengajaran dan pembelajaran yang ingin bergerak menuju transformasi. Menggunakan teknologi khusus untuk meningkatkan pembelajaran melalui keputusan pedagogis yang disengaja adalah landasan

bagi pengembangan profesional untuk praktik transformatif abad kedua puluh satu (Angeli & Valanides, 2015).

Sebagai guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman maka guru yang baik adalah guru yang selalu bersikap obyektif serta terbuka untuk menerima kritik terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya misalnya dalam hal caranya mengajar serta terus mengembangkan pengetahuannya terkait dengan profesinya sebagai pendidik. Hal ini diperlukan dalam upaya perbaikan mutu pendidikan demi kepentingan peserta didik sehingga benar-benar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa guru masih memiliki pemahaman internet yang terbatas terutama tentang pengajaran konten tertentu dengan menggunakan teknologi web, oleh sebab itu penting untuk memberikan kursus kepada guru (Kale, 2014; Koh & Chai, 2015; Kumar & Vigil, 2011) karena guru juga memiliki peran penting dalam penyediaan konten efisien yang dikembangkan dalam bentuk teknologi (Southall, 2012).

Sagala (2009: 32) menegaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola peserta didik yang meliputi: Pertama, pemahaman wawasan guru akan landsan dan filsafat pendidikan. Kedua, pemahaman potensi dan keberagaman peserta didik sehingga dapat di desain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan peserta didik. Ketiga, guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar. Keempat, guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi

dan kompetensi dasar. Kelima, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif, sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Keenam, mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur standar yang dipersyaratkan. Ketujuh, mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru berkewajiban mengembangkan kompetensi pedagogik yang dimilikinya dan kewajiban tersebut bertujuan untuk mempermudah proses belajar-mengajar dan agar dapat melakukan perubahan atau perbaikan dalam setiap pembelajarannya.

Kompetensi pedagogik pada penelitian ini hanya terbatas pada kemampuan penguasaan karakteristik peserta didik, penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan potensi peserta didik, cara komunikasi yang efektif, empatik dan santun dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi, tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

5. Kompetensi Profesional

Kata profesional erat kaitannya dengan kata profesi. Kata profesional berasal dari kata kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Lei *et al.* (2012) menemukan bahwa kesadaran diri tentang peran guru dan rasa memiliki dalam profesi guru adalah beberapa dimensi identitas profesional yang berkorelasi positif dengan keputusan, eksplorasi, dan keberhasilan individu dalam karier mengajar.

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta menambah keilmuan sebagai guru (Suprihatiningrum, 2016: 115, Suyanto & Jihad, 2013: 43). Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut. Pertama, menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Hal ini berarti guru harus memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi dan koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antarmata-pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam proses belajar-mengajar.

Kedua, menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi bahwa guru harus menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. Lebih lanjut Suyanto & Jihad (2013: 43) mengatakan istilah kompetensi profesional merupakan “payung” karena telah mencakup semua kompetensi lainnya, sedangkan

penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar sering disebut bidang studi keahlian. Hal ini mengacu pada pandangan yang menyebutkan bahwa sebagai guru yang berkompeten ia harus memiliki pemahaman terhadap karakter siswa, penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan, kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, kemauan dan kemampuan mengembangkn profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan.

Menurut Mulyasa (2006: 135-136) ruang lingkup kompetensi profesional guru ditunjukkan oleh beberapa indikator. Secara garis besar indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Kedua, mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. Ketiga, mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya. Keempat, mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kelima, mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan. Keenam, mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. Ketujuh, mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Kedelapan, mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Bourke *et al.* (2013) menjelaskan bahwa unsur kunci menegaskan kepercayaan dan kompetensi profesional adalah refleksi diri. Guru menjadikan refleksi sebagai bagian dari kebenaran rezim mereka untuk menganalisis secara

kritis praktek mereka sendiri sehingga mereka dapat berkembang secara profesional dan meningkatkan hasil siswa. Pemahaman yang jelas dan penuh tentang guru profesional juga harus menjadi titik awal untuk setiap sistem pendidikan yang sehat (Long *et al.*, 2017: 12).

Broom (2017: 164) mengemukakan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan di Meksiko lebih dituntut untuk memiliki keterampilan mengajar tidak hanya dikelas, tetapi lebih kepada bagaimana guru menekankan pada pembelajaran secara langsung ke masyarakat atau lembaga-lembaga pemerintahan. Siswa dikenalkan mengenal isu-isu kontemporer terkait dengan masalah sosial, politik lokal di Meksiko, seperti mengunjungi kantor pemerintahan atau berbicara dengan pejabat pemerintah.

Seorang guru dikatakan profesional apabila sudah memenuhi beberapa standar. Standar guru profesional yang dikeluarkan oleh *Australian Institute of Teaching and School Leadership* salah satunya lebih menekankan pada pentingnya seorang guru ikut terlibat dalam dalam sebuah proyek atau program pemerintah untuk mendedikasikan diri mengabdikan di sekolah-sekolah terpencil. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak di sekolah terpencil agar mendapat pendidikan layak dari guru profesional (White, 2016: 50-51).

Sementara menurut Johnsen (2012: 51) mengidentifikasi standar persiapan guru profesional sebagai berikut. Pertama, memahami isu-isu dalam definisi, teori, dan identifikasi siswa yang berbakat, termasuk yang berasal dari latar belakang yang beragam. Kedua, mengenali perbedaan pembelajaran,

tonggak perkembangan, dan karakteristik kognitif/afektif dari siswa yang berbakat, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda, dan mengidentifikasi kebutuhan akademik dan sosial yang terkait. Ketiga, memahami, merencanakan, dan mengimplementasikan berbagai strategi berbasis bukti untuk menilai siswa yang berbakat; untuk membedakan instruksi, konten, dan tugas untuk mereka (termasuk penggunaan keterampilan berpikir kritis dan kreatif tingkat tinggi); dan untuk menominasikan mereka untuk program lanjutan atau akselerasi sesuai kebutuhan.

Dawam (2008: 115) menjelaskan terdapat 5 ranah yang terkait dalam pentingnya pengembangan kompetensi profesional guru yaitu, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap diri dan kebiasaan diri. Guna melakukan hal tersebut, pengembangan kompetensi yang dimiliki guru dapat dilakukan melalui pelaksanaan penelitian, pembuatan karya tulis, penggunaan media pembelajaran, mengikuti diklat dan seminar.

Guru yang mempunyai kompetensi profesional harus mampu memilah dan memilih serta mengelompokkan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai jenisnya. Tanpa mengabaikan kompetensi yang lainnya, kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional. Berusaha keras untuk profesionalisme bukanlah melihatnya sebagai kondisi tetapi sebagai tujuan.

Dalam kaitannya dengan kompetensi profesional, guru harus mampu melakukan pengembangan. Pengembangan profesional guru didorong oleh kebutuhan untuk memperluas dan memperbaharui praktik, keterampilan, dan

kepercayaan guru. Rangsangan untuk kebutuhan seperti itu bisa karena perubahan kurikulum, teknologi ruang kelas baru, kemajuan pedagogi, atau semuanya. Namun, upaya yang mendasarinya adalah untuk meningkatkan hasil bagi siswa, apakah mereka difokuskan pada pemahaman, keterampilan, sikap, atau keterlibatan (Doig & Groves, 2011).

Sebagaimana pendapat dari Gultig (2010) bahwa tujuan pengembangan profesional di sisi lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, keterampilan, nilai dan praktik guru untuk kepentingan klien. Kompetensi tersebut harus dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Selaras dengan pendapat tersebut, Avalos (2011: 10) mengemukakan bahwa pengembangan profesional adalah tentang pembelajaran guru, belajar cara belajar, dan mengubah pengetahuan mereka menjadi praktik untuk kepentingan pertumbuhan siswa.

Kegiatan yang direkomendasikan untuk mendukung kompetensi profesional guru meliputi memeriksa data tentang kemajuan siswa, menganalisis pekerjaan siswa, menentukan strategi yang efektif untuk memfasilitasi pembelajaran, merancang dan mengkritisi pelajaran yang kuat, dan mengembangkan penilaian umum berbasis kelas untuk mengukur kemajuan (Mindich & Lieberman, 2012: 12). Kegiatan ini direkomendasikan untuk memusatkan perhatian guru pada kinerja siswa di ruang kelas mereka. Stewart (2014) juga mengemukakan bahwa guru dapat mengembangkan proyek pembelajaran profesional yang ditargetkan dalam pelajaran ketika

mereka dapat meluangkan waktu untuk menyelidiki pekerjaan yang dilakukan siswa mereka.

Kompetensi profesional dipandang penting untuk dikembangkan oleh para guru karena kompetensi profesional mencakup kemampuan guru dalam penguasaan terhadap materi pelajaran dan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. Keprofesionalan seorang pengajar mengacu pada anggapan mereka bahwa rekan kerja mereka melakukan pekerjaan dengan serius, menunjukkan komitmen yang tinggi, dan melampaui harapan minimum untuk memenuhi kebutuhan siswa (Moran: 2009).

Chang & Kuo (2011) mengamati lima tren dalam standar profesional guru. Pertama, mengembangkan standar profesional guru adalah investasi jangka panjang yang melibatkan banyak sumber daya manusia. Kedua, bidang penelitian pengajaran telah mengubah penelitian efektivitas guru tradisional menjadi penelitian konstruktivisme. Ketiga, meskipun standar profesional guru fokus pada kurikulum, pengajaran dan manajemen kelas, kegiatan profesional guru lainnya tapi komunitas pembelajaran dan tanggung jawab profesional tetap mempertimbangkan pengajaran umum. Keempat, standar-standar ini menekankan pengajaran guru tetapi pada akhirnya mempertimbangkan proses dan hasil belajar siswa. Kelima, cenderung untuk mengembangkan standar umum inti untuk berbagai disiplin ilmu dan tahap pembelajaran lalu kemudian mengembangkan standar untuk mata pelajaran tertentu dan tahap pembelajaran.

Sementara Hairon & Dimmock (2012) mengemukakan lima tren utama dalam kebijakan pengembangan guru di Singapura sejak tahun 1997. Pertama, arah kebijakan secara terus-menerus menempatkan tanggung jawab untuk pengembangan profesional pada guru. Kedua, pengembangan profesional secara langsung terkait dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran siswa. Ketiga, ada keinginan untuk mengintegrasikan praktik pengembangan profesional guru dengan praktik profesional guru sehingga mengaitkannya dengan pengembangan kurikuler dan pembelajaran siswa. Keempat, meskipun beragam platform pengembangan profesional telah mendapatkan pengakuan, penekanan diberikan pada bentuk pengembangan profesional yang kolaboratif dan berorientasi pada komunitas. Bentuk pembelajaran kolaboratif dianggap tidak hanya menghasilkan pengembangan konten dan pengetahuan konten pedagogis, tetapi juga persahabatan dan solidaritas di antara para guru. Kelima, preferensi muncul untuk penggunaan refleksi dan penyelidikan, dan penelitian tindakan dalam rangka menginterogasi dan mengembangkan konten subjek dan pengetahuan pedagogis.

Untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan dari program pengembangan profesional guru maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi pengembangan profesional guru diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas belajar siswa dengan membimbing kepemimpinan administrasi sekolah dan melalui evaluasi berbasis sekolah (Huang, 2016: 939). Seperti yang dikemukakan oleh Chang *et al.* (2014) bahwa dalam melakukan studi efektivitas evaluasi pengembangan profesional guru, titik fokus tetap pada

pengembangan profesional guru dan meningkatkan kualitas pengajaran. Oleh karena kurangnya perhatian langsung dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa maka evaluasi pengembangan profesional guru harus dipelajari lebih lanjut.

Studi tentang evaluasi pengembangan profesional guru telah meninjau implementasi dan efektivitasnya di berbagai tingkat dan untuk berbagai pemangku kepentingan. Chin *et al.* (2013) menyelidiki efektivitas pengembangan profesional tidak hanya untuk guru tetapi juga sistem, pemerintah daerah, agen pendanaan, sumber daya dan orang tua. Selaras dengan pendapat tersebut, Day (2012: 116-119), pendidikan di Amerika Serikat sudah mengembangkan kerjasama antara guru dan keluarga dengan latar belakang budaya yang berbeda. Guru dituntut untuk berkolaborasi dengan keluarga siswa dengan latar belakang yang berbeda untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan dan strategi pengajaran untuk anak-anak (siswa).

Peran pendidikan bukan hanya berpusat pada guru dan sekolah, tetapi di Amerika, keluarga dituntut untuk ikut andil dan bekerja sama dengan guru dalam mengembangkan potensi anak terutama dalam hal keberagaman kultur siswa untuk saling menghormati, sehingga tidak ada terjadi diskriminasi antar siswa yang disebabkan oleh faktor perbedaan budaya. Guru menekankan proses timbal balik budaya dengan menggunakan informasi dua arah yang diprakarsai oleh pendidik untuk bertukar informasi dengan keluarga dan melibatkan mereka dalam dialog tentang perkembangan anak mereka.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut berupa kemampuan dalam memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran.

Di dalam Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menjelaskan kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan b.konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Pertama, kemampuan penguasaan materi terdiri dari (a) kemampuan menguasai substansi pembelajaran, hal ini berarti guru harus memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah dan memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi dan koheren dengan materi ajar; (b) kemampuan mengorganisasikan materi pembelajaran, dalam hal ini berarti guru harus memahami hubungan antar mata pelajaran terkait dan

menyampaikan materi pelajaran secara berurutan; (c) kemampuan menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan siswa, dalam hal ini guru harus mampu menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Kedua, pemahaman terhadap perkembangan profesi yang terdiri dari (a) kemampuan mengikuti perkembangan kurikulum; (b) kemampuan mengikuti perkembangan iptek; (c) mampu menyesuaikan permasalahan umum dalam proses belajar dan hasil belajar; (d) kemampuan mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, metode dan sumber belajar yang relevan (sesuai); (d) kemampuan mengembangkan bidang studi; dan (e) kemampuan memahami fungsi sekolah.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas guru adalah melalui guru program sertifikasi untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar. Harapan dari program sertifikasi adalah “memprofesionalkan” pengajaran (Hammond & Hylar, 2013; Peck *et al.*, 2014; Stillman *et al.*, 2015). Memang, guru yang kompeten kemudian harus dihargai dengan kenaikan gaji yang tepat. (Chetty *et al.*, 2014).

Muslich (2007:2) menjelaskan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Mengingat buruknya kinerja sistem pendidikan pada umumnya, pemerintah

Indonesia memperkenalkan program sertifikasi guru yang ambisius pada 2007. Alasan utama program ini adalah kesadaran bahwa guru telah gagal dalam menghasilkan siswa berkemampuan akademis. Guru Indonesia memiliki kompetensi keseluruhan yang rendah dibandingkan dengan pekerjaan lain di Indonesia dan dengan guru di negara tetangga (Chang *et al*, 2014).

Pendapat tersebut didukung oleh Sarimaya (2008: 9) yang mengungkapkan bahwa program sertifikasi merupakan program pemberian sertifikat bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru profesional. Senada dengan pendapat tersebut, Payong (2011: 68) berpendapat bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu objek tertentu (orang, barang, atau organisasi) yang menandakan bahwa objek tertentu layak atau sesuai dengan kriteria, atau standar tertentu.

Dengan wewenang atas sertifikasi guru, negara telah dapat menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur kelayakan mengajar guru. Sertifikasi memiliki beberapa persyaratan khusus seperti jumlah kewajiban pengalaman lapangan, dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk mengajar siswa (Ludlow, 2011: 441). Selain itu, pengalaman praktikum juga diidentifikasi sebagai faktor yang signifikan mengenai persiapan dan keberhasilan guru pendidikan (Casey *et al.*, 2011: 290). Dalam hal ini sertifikasi diartikan sebagai suatu jaminan mutu kepada pengguna objek tersebut, karena guru merupakan seseorang yang bertugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan (organsasi sekolah), sehingga perlu ada suatu pembuktian ataupun uji kelayakan.

Menurut Mulyasa (2012: 34), sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Kunandar (2007: 79) juga mengungkapkan bahwa sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi.

Kegiatan sertifikasi profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik, dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian. Gitomer *et al.* (2011:433) mengemukakan bahwa ujian terhadap guru tidak dirancang untuk menjadi prediktor kualitas guru. Meskipun tes tidak dimaksudkan untuk menjamin keahlian atau bahkan praktik mengajar yang kompeten, akan tetapi tingkat pengetahuan minimum harus ditunjukkan oleh semua guru bersertifikasi.

Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Geiger *et al.* (2014), bahwa lisensi guru diberikan oleh negara untuk menunjuk individu yang dianggap memenuhi syarat sepenuhnya untuk mempraktikkan profesi mereka. Persyaratan lisensi biasanya terkait dengan standar persetujuan program persiapan pendidik dengan menetapkan standar minimum untuk lisensi guru.

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal 8 menyatakannya bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Ritter & Egalite (2014: 434-437) menjelaskan mengenai jalur yang paling umum untuk mendapatkan sertifikat pendidik di Amerika Serikat adalah melalui program persiapan tradisional, yaitu peserta menyelesaikan program pendidikan guru yang telah diakui negara (*a state approved teacher education program*) dari suatu perguruan tinggi atau universitas yang terakreditasi. Melalui program ini, calon-calon guru belajar teori pendidikan mengenai perkembangan anak, mendapatkan pelatihan keterampilan pedagogik praktis, dan menyelesaikan pengalaman klinis yang terdiri dari observasi dan praktek langsung di kelas yang sebenarnya. Sebagai contoh, kurikulum pelatihan tingkat dasar (*an elementary training curriculum*) mencakup materi matematika dan membaca, selain dari materi-materi tentang pengelolaan kelas, perencanaan pelajaran, bagaimana menilai hasil pembelajaran siswa (*student*

learning), dan strategi untuk menghadapi sub-kelompok khusus seperti peserta didik dengan tambahan pelajaran bahasa Inggris atau siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Sebaliknya, kurikulum pelatihan tingkat lanjutan (*secondary training curriculum*) memfokuskan porsi pelatihan keguruan yang lebih besar pada pengembangan pengetahuan konten khusus.

Sertifikasi guru di Indonesia dikenal dengan dua jenis sertifikasi yaitu sertifikasi guru dalam jabatan dan sertifikasi guru prajabatan. Khusus untuk sertifikasi guru dalam jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 yang selanjutnya diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Adapun sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi (penilaian portofolio) dan pemberian sertifikat secara langsung.

Uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio (kumpulan dokumen) yang mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum

ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Sementara guru yang belum lulus penilaian portofolio, dalam arti belum mencapai skor minimal yang dipersyaratkan untuk kelulusan portofolio, terdapat dua kemungkinan yaitu melengkapi dokumen portofolio yang diperkirakan dapat mempengaruhi skor peningkatan kelulusan portofolio atau diharuskan mengikuti PLPG yang dilaksanakan selama 30 jam teori dan 60 jam praktik (1 jam setara dengan 50 menit). Di awal pelaksanaan PLPG, kemampuan guru akan dites terlebih dahulu sesuai dengan bidang studi yang diampunya. Selama mengikuti diklat profesi, guru akan menerima pendalaman materi mencakup empat aspek penting, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Di akhir pelatihan, seluruh peserta akan diuji kembali dengan ujian tertulis dan ujian praktik mengajar. Selain ujian tersebut, peserta akan diberi kesempatan melakukan penilaian terhadap teman sejawat berdasarkan pengalaman mereka selama mengikuti pelatihan.

Sehubungan dengan lama sertifikasi dan perolehan keterampilan dan kecakapan dalam mengajar serta peningkatan profesionalitas, Rozman & Koren (2013: 1212) menyatakan dalam makalahnya yang berjudul "*Learning to Learn as a Key Competence and Setting Learning Goals*" yang disajikan dalam *International Conference* bahwa melalui pengelolaan waktu dan informasi secara efektif, guru dapat terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya dengan terus menyadari proses dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalitasnya, mengidentifikasi setiap kesempatan yang

tersedia untuk terus-menerus belajar. Dengan demikian, semakin lama waktu seorang guru menyandang status keprofesionalannya, semakin besar pula kesempatan dan waktu guru untuk meningkatkan profesionalitas dengan memanfaatkan program-program yang diwajibkan oleh proses sertifikasi untuk terus menggunakan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan (*skill*) yang diperolehnya dalam berbagai konteks baik di rumah, di tempat kerja, dan dalam proses pendidikan dan pelatihannya.

Selain mengetahui konsep tentang pengertian dan persyaratan mengenai sertifikasi, penting juga untuk mengkaji tentang manfaat dari program sertifikasi itu sendiri. Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, ia berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Menurut Muslich (2007:9), manfaat uji sertifikasi antara lain sebagai berikut. Pertama, melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. Kedua, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. Ketiga, menjadi wahana

penjamin mutu bagi lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. Keempat, menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

6. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi tujuan utama dalam mengembangkan sikap dan keterampilan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya yaitu sebagai warga negara yang memiliki karakter cerdas dan terampil. Karakter tersebut tentunya sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini Sumantri (2001: 59) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan sebagai suatu seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia. Ilmu-ilmu tersebut diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai tujuan pendidikan.

Sependapat dengan pendapat tersebut, Asyafiq (2017: 168) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berfungsi untuk membangun kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal itu merupakan upaya untuk membentuk identitas terhadap warga negara bagi suatu bangsa. Mengikuti pendapat Kerr (1999) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dirumuskan secara luas yang mencakup proses generasi muda untuk mengambil peran dan

tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dalam hal ini yaitu menjadi warga negara yang baik atau demokratis.

Sementara menurut Huang & Chen (2013: 80), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen utama yang sangat penting dalam mengembangkan pendidikan holistik. Dengan kata lain Pendidikan Kewarganegaraan berusaha mengajarkan kepada peserta didik tentang identitas individu, tujuan, makna hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, nilai-nilai spiritual, dan lingkungan alam.

Adapun tujuan dari PKn adalah untuk memupuk kesadaran akan kewajiban asasi. Kewajiban dalam usaha bela negara melalui perilaku cinta tanah air dan usaha pertahanan keamanan negara melalui kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha tersebut dapat tercapai dengan pola pikir yang komprehensif integral (Bakry, 2014: 8-9). Model berfikir komprehensif integral adalah model berfikir dengan memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan setiap masalah yang timbul yaitu dengan memperhatikan hubungan berbagai aspek secara menyeluruh dan menyatu agar setiap masalah dapat terselesaikan.

Tujuan pembelajaran PPKn juga dikemukakan oleh Wahab & Sapriya (2011: 346) yaitu menjadi warga negara yang berpartisipasi dengan penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan, taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk karakter warga negara yang baik

yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta membentuk kualitas kepribadian.

Terdapat keragaman pendapat mengenai apa itu karakter yang “baik”. Konsep karakter baik (*good character*) menurut Lickona (1991) yaitu sebagai suatu kebajikan yang bisa dibagi dalam dua kategori, yakni kebajikan pada diri sendiri (*self-oriented virtuous*) dan kebajikan terhadap orang lain (*other-oriented virtuous*). Kebajikan pada diri sendiri misalnya pengendalian diri dan kesabaran. Sementara kebajikan terhadap orang lain misalnya kesediaan berbagi dan merasakan kebahagiaan. Kebajikan itu bukan sekedar sikap, tetapi juga merupakan pengetahuan dan perilaku. Oleh karena itu secara populer, karakter itu meliputi tiga hal, yakni mengetahui yang baik (*knowing the good*), merasakan hal baik (*feeling the good*) dan melakukan hal baik (*acting the good*).

Selanjutnya Lickona (2007) mengemukakan dari sejumlah kebajikan, ada 10 (sepuluh) kebajikan utama yang perlu dalam pendidikan karakter yakni kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, kontrol diri, cinta, integritas, kerja keras, terima kasih, kerendahan hati, dan sikap positif. Karakter baik juga diperkenalkan oleh Branson (1998), bahwa karakter sebagai suatu kebajikan yang meliputi dua hal, yakni kebajikan publik (*public character*) dan kebajikan privat (*privat character*). Karakter publik misalnya semangat publik, kesopanan, menghormati aturan hukum, pemikiran kritis, serta kesediaan untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan berkompromi. Sedangkan karakter

privat misalnya tanggung jawab moral, disiplin diri, serta keharusan menghormati martabat dan harga diri setiap individu.

Heater (2004) yang merunut pernyataan dari Aristoteles tentang konsep karakter sebagai suatu kebajikan atau virtue mengemukakan bahwa warga negara yang baik itu ditandai oleh adanya karakter kebajikan yang meliputi 4 hal yakni kesederhanaan, keadilan, keberanian atau keteguhan dan kebijaksanaan atau kesopanan.

Dari beberapa uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep warga negara yang baik adalah ditandai dengan adanya karakter kebajikan. Karakter kebajikan meliputi dua hal, yakni karakter yang sifatnya individual atau privat yang ditujukan pada diri sendiri dan karakter yang sifatnya publik, ditujukan pada orang lain.

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam menciptakan karakter warga negara yang baik dapat tercapai apabila mengembangkan beberapa kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan. Menurut Branson (1999: 8-25), Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang hendak dikembangkan oleh mata pelajaran ini terdiri dari *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic dispositions* (karakter kewarganegaraan).

Pengetahuan Kewarganegaraan merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban/peran sebagai warga, pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik,

pemerintahan dan sistem sosial yang ideal. Selanjutnya kompetensi keterampilan kewarganegaraan. Keterampilan kewarganegaraan dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewarganegaraan mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi.

Sedangkan kompetensi terakhir yaitu karakter kewarganegaraan. Karakter kewarganegaraan merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum.

7. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam menguasai suatu pelajaran (Liyusri & Situmorang, 2013:65). Dalam melakukan kegiatan belajar terjadi proses berpikir sehingga timbul pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang diberikan. Dari pemahaman dan penguasaan materi yang di dapat setelah melalui proses belajar mengajar maka peserta didik telah memahami suatu perubahan dari yang tidak diketahui menjadi diketahui. Dalam hal ini dapat dilihat saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas jika peserta didik aktif dan mendapat prestasi di kelas, maka dapat dikatakan bahwa terjadi perubahan dari hasil belajar tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hancock *et al.* (2002: 365) bahwa salah satu hasil pembelajaran yang penting adalah prestasi siswa di kelas. Hasil belajar dijadikan dasar untuk membentuk kurikulum atau program akademik, silabus, pengembangan mata pelajaran, serta penilaian pembelajaran (Klaczynski, 2012). Hasil belajar siswa juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk dapat melakukan banyak hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas akademik dan efektivitas kelembagaan (Kuh *et al.*, 2014).

Hasil belajar dapat diketahui melalui diadakannya sebuah tes bagi peserta didik. Melalui hasil tes itulah guru akan melihat tingkat kemampuan peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kalhotra (2014: 36), bahwa kecerdasan bukanlah kualitas tunggal, namun kombinasi dari sejumlah kualitas. Oleh karena itu, perlunya diadakan tes selain untuk mengetahui hasil belajar peserta didik juga untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan cara mengklasifikasikan tingkat kemampuan peserta didik dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah.

Hasil belajar akan memberikan kejelasan kepada guru tentang tingkat pemahaman peserta didik dalam menangkap informasi dari guru yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ambrosetti (2018: 241) mengemukakan dalam iklim reformasi yang berfokus kepada efektivitas praktik guru, ada sebuah harapan besar bahwa guru akan mampu memperoleh hasil pembelajaran yang lebih baik untuk semua siswa dan berimplikasi pada keterampilan guru di abad 21. Penilaian kinerja sangat membantu guru di

Australia dalam memberikan pemahaman kepada mereka untuk merefleksikan capaian pembelajaran ditargetkan sekolah atau pemerintah.

Salah satu cara guru untuk mendapatkan kualitas pengajaran yang baik adalah melalui manajemen kelas (Atlay *et al.*, 2019). Ruang kelas dengan komposisi sosial yang beragam, di mana masalah dan gangguan sering terjadi di antara siswa, sangat penting untuk menyediakan manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas dilakukan untuk memastikan bahwa ada waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran. Kualitas pengajaran dan hasil belajar di antara siswa secara signifikan terkait dengan penggunaan waktu di kelas secara efektif melalui manajemen kelas yang baik.

Selain penggunaan waktu secara efektif, guru harus memprioritaskan materi yang diberikan dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Guru yang efektif fokus pada topik inti dan mengurutkan informasi untuk mencakup materi dasar sebelum memperkenalkan topik baru. Selain itu, mereka mengatur kegiatan siswa, dan memilih untuk menyajikan konten melalui instruksi segmen kecil selama beberapa hari daripada merencanakan satu kegiatan untuk membahas seluruh konsep. Mereka menugaskan kegiatan siswa yang mempromosikan pemahaman pengetahuan (Gage *et al.*, 2012).

Guru juga harus menyajikan pembelajaran yang relevan secara sosial dengan kehidupan siswa untuk membantu mereka menerapkan pengetahuan yang diperoleh di luar sekolah. Benton *et al.*, (2013) melakukan penelitian tentang hubungan antara penilaian yang dilaporkan sendiri oleh siswa pada persepsi tentang pembelajaran dan kinerja mereka serta pentingnya bahan yang

disajikan oleh guru. Siswa yang menilai diri mereka luar biasa menganggap materi yang disampaikan oleh guru adalah relevan, dan memiliki nilai yang lebih baik saat ujian daripada siswa yang menilai kemajuan mereka pada kategori sedang atau kurang.

Cara tersebut juga akan menghadirkan komunikasi yang efektif meningkat sesuai dengan tingkat antusiasme pengajar, tingkat stimulasi lingkungan kelas, dan penggunaan pertanyaan yang menantang untuk memprovokasi keterampilan berpikir kritis. Pengajar yang komunikatif menyadari berbagai modal pembelajaran yang dapat mengatasi perbedaan gaya belajar siswa ketika mereka berusaha untuk memahami konten dan pengaplikasiannya (Educational Testing Service, 2013).

Menciptakan lingkungan kelas yang merangsang dan menarik adalah penting untuk keberhasilan siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Williams *et al.*, (2013) tentang *Stimulating and Enhancing Student Learning Through Positive Emotions* telah menunjukkan bahwa emosi positif dapat menumbuhkan kesejahteraan dan meningkatkan hasil siswa. Ia mengemukakan bahwa siswa yang mengalami emosi positif dan dirangsang di dalam kelas mengalami tingkat motivasi yang lebih tinggi, dan menunjukkan perilaku yang mengarah pada keberhasilan akademik termasuk belajar, kehadiran, peningkatan partisipasi, dan peningkatan pemahaman materi pelajaran. Siswa tersebut juga memiliki pandangan yang lebih positif pada prestasi akademik mereka.

Untuk meningkatkan partisipasi siswa, maka hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah melibatkan siswa dalam pembelajaran. Bekerja sama dalam kelompok kecil saat menyelesaikan tugas-tugas memungkinkan mereka untuk tetap terlibat dalam pembelajaran, bertukar pikiran, belajar satu sama lain, dan menerapkan pengetahuan secara kolaboratif. Semakin pengajar memotivasi dan mendorong siswa mereka untuk berhasil, semakin besar pula kemungkinan siswa akan merasa terhubung dengan materi, lebih percaya pada diri mereka sendiri, dan meningkatkan hasil belajar mereka. Menurut Webber *et al.* (2013), keterlibatan dan upaya siswa adalah faktor kunci keberhasilan di perguruan tinggi. Tingkat keterlibatan siswa yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan IPK dan persepsi siswa tentang pengalaman kuliah mereka. Siswa yang dipersiapkan untuk kelas yang mereka anggap menantang memiliki IPK yang lebih tinggi dan melaporkan pengalaman kuliah yang lebih memuaskan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Paolini (2015) tentang *Enhancing Teaching Effectiveness and Student Learning Outcomes* yang menyimpulkan bahwa pengajar yang berpusat pada siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa apabila membuat kurikulum yang merangsang, berinteraksi dengan siswa, menggunakan instruksi yang berbeda, menangani materi yang relevan, menawarkan respon-respon budaya, memfasilitasi informasi dan memberdayakan siswa. Selanjutnya agar lebih efektif maka guru mengumpulkan, menafsirkan, dan mengimplementasikan data tentang hasil belajar siswa untuk menilai kelebihan dan kelemahan siswa, pembelajaran

pembelajaran yang tepat, dan penilaian terhadap instruksi yang diberikan karena prestasi akademik siswa dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan dan gaya belajar khusus (Damavandi, 2011: 187). Guru yang memanfaatkan hasil belajar siswa dapat membimbing praktik mereka dalam mengembangkan ruang kelas yang mendorong pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan siswa.

Jacob *et al.* (2016) menjelaskan tentang sepuluh elemen pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pertama, Siswa dan guru sebagai rekan belajar, artinya guru dengan senang hati mengakui bahwa mereka tidak tahu segalanya dan berharap untuk belajar bersama dengan siswa. Kedua, interaksi antar siswa, artinya guru mendorong siswa untuk berbagi dengan teman sebaya mereka karena hal tersebut dapat membawa keuntungan kognitif dan afektif. Ketiga, otonomi pelajar yaitu siswa menjadi kurang bergantung pada guru dengan membangun keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk belajar sepanjang hayat. Keempat, fokus pada makna yang berarti bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika siswa sepenuhnya memahami apa yang mereka pelajari. Kelima, integrasi kurikuler yaitu siswa melihat bagaimana berbagai topik dan mata pelajaran yang mereka pelajari terkait satu sama lain dan dengan dunia yang lebih luas.

Keenam, keragaman pembelajaran yaitu melalui kegiatan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan semua siswa dan membantu siswa menghargai perbedaan di antara mereka. Ketujuh, Kemampuan berpikir yang artinya siswa melampaui informasi yang diberikan kepada mereka dengan memberikan contoh, tidak setuju, dan menjelaskan. Kedelapan, Penilaian alternatif yaitu

penilaian meluas hingga mencakup bentuk-bentuk nontradisional dan mendorong siswa untuk bergabung dengan guru sebagai penilai di banyak titik dalam proses pembelajaran. Kesembilan, iklim belajar yaitu guru berupaya menciptakan suasana yang kondusif untuk partisipasi yang kuat oleh semua anggota kelas. Dan kesepuluh adalah motivasi. Guru memberikan motivasi intrinsik dan mendorong siswa untuk memotivasi diri mereka sendiri, teman sebaya, dan guru untuk belajar dan menikmati belajar. Özen (2017) memandang bahwa motivasi adalah salah satu faktor terpenting dalam memastikan prestasi siswa. Menurutnya motivasi adalah keadaan di mana individu menampilkan berbagai sikap atau memobilisasi diri mereka secara sukarela untuk mencapai tujuan tertentu.

Pembelajaran langsung di lingkungan sosial (di lingkungan kelas dan sekolah), dan interaksi dengan teman sebaya juga harus diperhitungkan sebagai faktor penentu dalam hasil belajar siswa (Nilsen *et al.*, 2016), misalnya ruang kelas dan sekolah seperti disiplin, dukungan guru, kualitas pengajaran dan iklim sekolah mempengaruhi prestasi dan motivasi siswa.

Beberapa ahli yang mempelajari ranah-ranah hasil belajar tersebut dengan menggolongkan hasil kemampuan-kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara hierarkis. Berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson & Krathwohl pada tahun 2001 menjelaskan bahwa domain kognitif terdiri dari enam jenjang kemampuan yaitu sebagai berikut.

Pertama, mengingat (*remember*) merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja

didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat merupakan dimensi yang berperan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna dan pemecahan masalah. Kemampuan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh lebih kompleks. Mengingat meliputi mengenali dan memanggil kembali. Mengenali berkaitan dengan mengetahui pengetahuan masa lampau yang berkaitan dengan hal-hal yang konkret, misalnya tanggal lahir, alamat rumah, dan usia, sedangkan memanggil kembali adalah proses kognitif yang membutuhkan pengetahuan masa lampau secara cepat dan tepat.

Kedua, memahami/mengerti (*understand*) berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. Memahami/mengerti berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan dan membandingkan. Mengklasifikasikan akan muncul ketika seorang siswa berusaha mengenali pengetahuan yang merupakan anggota dari kategori pengetahuan tertentu. Mengklasifikasikan berawal dari suatu contoh atau informasi yang spesifik kemudian ditemukan konsep dan prinsip umumnya. Membandingkan merujuk pada identifikasi persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih obyek, kejadian, ide, permasalahan, atau situasi. Membandingkan berkaitan dengan proses kognitif menemukan satu persatu ciri-ciri dari obyek yang diperbandingkan.

Ketiga, menerapkan (*apply*) menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan

dimensi pengetahuan prosedural. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur dan mengimplementasikan. Menjalankan prosedur merupakan proses kognitif siswa dalam menyelesaikan masalah dan melaksanakan percobaan di mana siswa sudah mengetahui informasi tersebut dan mampu menetapkan dengan pasti prosedur apa saja yang harus dilakukan. Jika siswa tidak mengetahui prosedur yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan maka siswa diperbolehkan melakukan modifikasi dari prosedur baku yang sudah ditetapkan. Mengimplementasikan muncul apabila siswa memilih dan menggunakan prosedur untuk hal-hal yang belum diketahui atau masih asing. Karena siswa masih merasa asing dengan hal ini maka siswa perlu mengenali dan memahami permasalahan terlebih dahulu kemudian baru menetapkan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Mengimplementasikan berkaitan erat dengan dimensi proses kognitif yang lain yaitu mengerti dan menciptakan.

Menerapkan merupakan proses yang kontinu, dimulai dari siswa menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan prosedur baku/standar yang sudah diketahui. Kegiatan ini berjalan teratur sehingga siswa benar-benar mampu melaksanakan prosedur ini dengan mudah, kemudian berlanjut pada munculnya permasalahan-permasalahan baru yang asing bagi siswa, sehingga siswa dituntut untuk mengenal dengan baik permasalahan tersebut dan memilih prosedur yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan.

Keempat, menganalisis (*analyze*) merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan

mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Kemampuan menganalisis merupakan jenis kemampuan yang banyak dituntut dari kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah.

Berbagai mata pelajaran menuntut siswa memiliki kemampuan menganalisis dengan baik. Tuntutan terhadap siswa untuk memiliki kemampuan menganalisis sering kali cenderung lebih penting daripada dimensi proses kognitif yang lain seperti mengevaluasi dan menciptakan. Kegiatan pembelajaran sebagian besar mengarahkan siswa untuk mampu membedakan fakta dan pendapat, menghasilkan kesimpulan dari suatu informasi pendukung. Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif memberi atribut dan mengorganisasikan. Memberi atribut akan muncul apabila siswa menemukan permasalahan dan kemudian memerlukan kegiatan membangun ulang hal yang menjadi permasalahan. Kegiatan mengarahkan siswa pada informasi-informasi asal mula dan alasan suatu hal ditemukan dan diciptakan. Mengorganisasikan menunjukkan identifikasi unsur-unsur hasil komunikasi atau situasi dan mencoba mengenali bagaimana unsur-unsur ini dapat menghasilkan hubungan yang baik.

Mengorganisasikan memungkinkan siswa membangun hubungan yang sistematis dan koheren dari potongan-potongan informasi yang diberikan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh siswa adalah mengidentifikasi unsur yang paling penting dan relevan dengan permasalahan, kemudian melanjutkan dengan membangun hubungan yang sesuai dari informasi yang telah diberikan.

Kelima, evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria atau standar ini dapat pula ditentukan sendiri oleh siswa. Standar ini dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif serta dapat ditentukan sendiri oleh siswa.

Perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan penilaian merupakan dimensi mengevaluasi, namun hampir semua dimensi proses kognitif memerlukan penilaian. Perbedaan antara penilaian yang dilakukan siswa dengan penilaian yang merupakan evaluasi adalah pada standar dan kriteria yang dibuat oleh siswa. Jika standar atau kriteria yang dibuat mengarah pada keefektifan hasil yang didapatkan dibandingkan dengan perencanaan dan keefektifan prosedur yang digunakan maka apa yang dilakukan siswa merupakan kegiatan evaluasi. Evaluasi meliputi mengecek dan mengkritisi.

Mengecek mengarah pada kegiatan pengujian hal-hal yang tidak konsisten atau kegagalan dari suatu operasi atau produk. Jika dikaitkan dengan proses berpikir merencanakan dan mengimplementasikan maka mengecek akan mengarah pada penetapan sejauh mana suatu rencana berjalan dengan baik. Mengkritisi mengarah pada penilaian suatu produk atau operasi berdasarkan pada kriteria dan standar eksternal. Mengkritisi berkaitan erat dengan berpikir kritis. Siswa melakukan penilaian dengan melihat sisi negatif dan positif dari suatu hal, kemudian melakukan penilaian menggunakan standar ini.

Keenam, menciptakan (*create*) mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan

yang koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya. Menciptakan sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar siswa pada pertemuan sebelumnya. Meskipun menciptakan mengarah pada proses berpikir kreatif, namun tidak secara total berpengaruh pada kemampuan siswa untuk menciptakan. Menciptakan di sini mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh semua siswa. Perbedaan menciptakan ini dengan dimensi berpikir kognitif lainnya adalah pada dimensi yang lain seperti mengerti, menerapkan, dan menganalisis siswa bekerja dengan informasi yang sudah dikenal sebelumnya, sedangkan pada menciptakan siswa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baru.

Menciptakan meliputi menggeneralisasikan dan memproduksi. Menggeneralisasikan merupakan kegiatan merepresentasikan permasalahan dan penemuan alternatif hipotesis yang diperlukan. Menggeneralisasikan ini berkaitan dengan berpikir divergen yang merupakan inti dari berpikir kreatif. Memproduksi mengarah pada perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Memproduksi berkaitan erat dengan dimensi pengetahuan yang lain yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognisi.

Anderson dan Krathwohl membagi dua dimensi (proses kognitif dan pengetahuan) yang sebelumnya menurut Bloom hanya satu dimensi kognitif saja. Selain itu, pada dimensi proses kognitif ada perbedaannya dengan Bloom,

yaitu dimensi pertama (ingatan sebelumnya pengetahuan), dimensi kelima (evaluasi sebelumnya sintesis) dan dimensi keenam (menciptakan sebelumnya evaluasi). Sedangkan pada dimensi pengetahuan (sebelumnya ada pada tingkat pertama kawasan kognitif), Anderson dan Krathwolh membaginya menjadi empat tingkatan, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan meta-kognitif.

Domain kedua dalam hasil belajar siswa adalah domain afektif (*Affective Domain*). Domain afektif yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Domain afektif terdiri atas beberapa jenjang kemampuan sebagai berikut.

Pertama, kemauan menerima (*receiving*), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali dengan penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya: menanyakan, memilih, menggambarkan, mengikuti, memberikan, berpegang teguh, menjawab, menggunakan.

Kedua, kemauan menanggapi/jawab (*responding*), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk tidak hanya peka pada suatu fenomena tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada kemauan peserta didik untuk menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya:

mengemukakan, menjawab, membantu, memperbincangkan, menunjukkan, mempraktikkan, memberitahu, memberi nama, membaca, melaporkan, menuliskan, mendiskusikan.

Ketiga, menilai (*valuing*), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena atau tingkah laku tertentu secara konsisten. Kata kerja operasional yang digunakan diantaranya: melengkapi, menerangkan, membentuk, mengusulkan, mengambil bagian, dan memilih. Keempat, organisasi (*organization*), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai. Kata kerja operasional yang dapat digunakan diantaranya: mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, mempertahankan, menggeneralisasikan, memodifikasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam ranah afektif, dapat diketahui bahwa peserta didik yang belajar akan memperbaiki kemampuan yang ada didalam dirinya (*internal*). Artinya, peserta didik mempelajari kepekaan tentang suatu hal sampai pada penghayatan nilai, sehingga menjadi suatu pegangan hidup. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai.

Selanjutnya domain ketiga adalah domain psikomotor (*psychomotor domain*). Domain psikomotor yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Perubahan pola gerakan memakan waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kata kerja operasional yang

digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing yaitu sebagai berikut. Pertama, *muscular of motor skill*, yang meliputi mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, menampilkan. Kedua, *manipulations of materials or objects*, yang meliputi: mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Ketiga, *neuromuscular coordination*, yang meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik dan menggunakan.

Perolehan hasil belajar peserta didik juga dapat didorong dengan adanya beasiswa, dimana peserta didik yang memperoleh beasiswa di sekolah akan berusaha mendapatkan hasil belajar yang tinggi karena hal itu merupakan persyaratan dari penerimaan sebuah beasiswa. Jika peserta didik memperoleh hasil belajar yang buruk maka beasiswa yang telah diberikan akan dicabut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kubal *et al.* (2003: 442), bahwa sebagai objek penilaian, hasil belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya dengan memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada peserta didik.

Dari beberapa pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah kemampuan siswa baik ditinjau dari domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain keefektifan

mengajar guru, relevansi materi pelajaran, lingkungan kelas yang menarik dan merangsang keterlibatan siswa, serta didorong oleh adanya beasiswa.

B. Kajian Penelitian Relevan

Relevansi penelitian ini dengan beberapa penelitian lain adalah terletak pada kesamaan variabel. Adapun beberapa penelitian lain tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asnandar Abubakar (2015) tentang “*Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Pendidikan Pada MA Di Kota Kendari*” (Jurnal). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Dampak terhadap perencanaan program Madrasah yaitu mayoritas responden terlibat langsung dalam penyusunan rumusan visi misi, tujuan, dan rencana kerja madrasah adalah 85% dengan indeks 3.08, ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas madrasah terutama pada aspek perumusan tujuan dan rencana kerja madrasah. (2) Dampak terhadap pelaksanaan rencana kerja madrasah yaitu keterlibatan guru menunjukkan nilai signifikansi baik dengan presentasi 77.7% dan indeks 2.71. (3) Dampak terhadap peningkatan proses pembelajaran yaitu menunjukkan nilai 98.6% dengan indeks 3.75. (4) Dampak terhadap peningkatan kompetensi sesama guru memiliki presentasi dan indeks yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas madrasah, yaitu 96.0% dan 3.50. (5) Dampak terhadap pemanfaatan tunjangan sertifikasi tidak terlalu

memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas madrasah yaitu hanya 36.0% dengan indeks 1.66.

2. Penelitian oleh Fatiah Kharisma Melati (2013) tentang “*Pengaruh Sertifikasi Guru Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru SMAN 5 Surakarta*” (Jurnal). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif sertifikasi guru terhadap kinerja guru SMAN 5 Surakarta. (2) Terdapat pengaruh positif motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA N 5 Surakarta. (3) Terdapat pengaruh positif sertifikasi guru dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA N 5 Surakarta.
3. Penelitian oleh Rosihan Anwar (2011) tentang “*Pengaruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) terhadap Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Mengajar Guru SMA Negeri Kota Tasikmalaya*” (Jurnal). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara keseluruhan MGMP berada dalam kategori tinggi; secara keseluruhan profesionalisme guru berada dalam kategori sangat tinggi; dan secara keseluruhan kinerja mengajar guru berada dalam kategori tinggi. (2) MGMP berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru sebesar 27,7%, dan sisanya sebesar 73,3,00% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya sarana dan prasarana sekolah. (3) MGMP mempengaruhi kinerja mengajar guru sebesar 10,9%, dan sisanya sebesar 89,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya media dan alat pembelajaran. (4) MGMP dan profesionalisme guru mempengaruhi

kinerja mengajar guru sebesar 35,3%, dan sisanya sebesar 64,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya metode pembelajaran.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Dewi Murniati, dkk (2013) tentang “*Kontribusi Kompetensi Profesional, Kompetensi Pedagogik, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru PKn pada SMP Negeri Se-Kabupaten Tabanan*”(Jurnal). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Terdapat kontribusi yang signifikan antara kompetensi profesional dengan kinerja guru PKn dengan kontribusi sebesar 40,5 % dan sumbangan efektif sebesar 35,%. (2) Terdapat kontribusi yang signifikan antara kompetensi pedagogik dengan kinerja guru PKn dengan kontribusi sebesar 6,1% dan sumbangan efektif sebesar 2,8%. (3) Terdapat kontribusi yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kinerja guru PKn dengan kontribusi sebesar 12,7% dan sumbangan efektif sebesar 3,9% dan (4) Terdapat kontribusi yang signifikan antara kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru PKn dengan kontribusi sebesar 42,5%.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Suhairiah Rachmawati, Imam Muchtar, Umar H.M. Shaleh (2014) tentang “*Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas VI Mata Pelajaran PKn Materi Pokok Demokrasi Melalui Penerapan Model Pembelajaran Scramble di SD Negeri Kademangan 1 Bondowoso*” (Jurnal). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa kelas VI SD Negeri

Kademangan 1 Bondowoso pada mata pelajaran PKn materi pokok Demokrasi melalui penerapan model pembelajaran scramble mengalami peningkatan. Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 72,79% (aktif). Persentase aktivitas belajar siswa pada siklus II meningkat sebesar 11,76% menjadi 84,55% (sangat aktif). Hasil belajar siswa kelas VI SD Negeri Kademangan 1 Bondowoso pada mata pelajaran PKn materi pokok Demokrasi melalui penerapan model pembelajaran scramble juga mengalami peningkatan. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 66,67%. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 15,68% menjadi 82,35%.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Betty Widya Asri dan Isa Ansori (2015) tentang “*Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Menggunakan Model Talking Stick dengan Media Audio-Visual*” (Jurnal). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 22 (baik), siklus II memperoleh skor 24 (baik), dan siklus III memperoleh skor 28 (sangat baik). (2) Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 22,48 (baik), siklus II memperoleh rata-rata skor 24,58 (baik), dan siklus III memperoleh rata-rata skor 27,37 (sangat baik). (3) Hasil belajar siswa pada siklus I mengalami ketuntasan klasikal sebesar 57,5% (sedang), mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 74,75% (tinggi), dan mengalami peningkatan di siklus III menjadi 85,75% (sangat tinggi). Simpulan penelitian adalah penerapan model *Talking Stick*

dengan media audio-visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKN.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lebih menekankan pada pengaruh sertifikasi guru, keterlibatan dalam MGMP, kompetensi pedagogik dan profesional guru PPKn terhadap hasil belajar siswa di SMA Kota Malang. Pertama terdapat perbedaan variabel bebas dan variabel terikat yang diujikan dengan penelitian sebelumnya; kedua perbedaan metode analisis; ketiga tempat penelitian berbeda dengan penelitian saat ini dilakukan dan yang keempat objek penelitian yaitu siswa dan guru PPKn SMAN yang terlibat dalam MGMP PPKn SMA dan di Kota Malang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Keterlibatan dalam MGMP, Kompetensi Pedagogik, dan Profesional Guru PPKn dengan Hasil Belajar Siswa Di SMA Kota Malang”.

C. Kerangka Pikir

Pencapaian tujuan pendidikan nasional terutama bergantung pada komponen guru. Segala tindakan dan pemikiran seorang guru dianggap memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan pendidikan khususnya di lembaga sekolah. Untuk itu sangat diharapkan guru dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tuntutan profesinya.

Jika ingin mengembangkan profesionalisme guru juga diperlukan wadah kerja sama yang memberikan wewenang serta tersedianya waktu untuk mengadakan pertemuan dalam melaksanakan tugas profesional (mengajar).

Kaitannya dengan pembinaan (supervisi) Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah supervisi kelas (pelaksanaan kegiatan belajar mengajar) yang dilaksanakan oleh guru inti (instruktur) merupakan bentuk pelaksanaan supervisi kesejawatan yang dilakukan secara kelompok dengan orientasi kolaboratif.

Guru selama melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar perlu diujikan keprofesionalan mereka dalam Uji Kompetensi Guru (UKG). Kompetensi yang diujikan yaitu kompetensi pedagogik dan profesional guru. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sedangkan kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Mestinya apabila guru terlibat dalam MGMP, disertai pula dengan kompetensi pedagogik dan profesional yang baik, maka diharapkan berbanding lurus dengan hasil belajar siswa, artinya hasil belajar siswa juga akan baik.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka kerangka berpikir penelitian dapat disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kajian teori di atas, kajian hasil penelitian yang relevan, dan kerangka pikir penelitian ini, dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Ada hubungan positif dan signifikan antara keterlibatan guru PPKn dalam MGMP dengan hasil belajar siswa SMAN di Kota Malang.
2. Ada hubungan positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik guru PPKn dengan hasil belajar siswa SMAN di Kota Malang.
3. Ada hubungan positif dan signifikan antara kompetensi profesional guru PPKn dengan hasil belajar siswa SMAN di Kota Malang.